

LAPORAN PENELITIAN

Indikator Kemiskinan
Kabupaten Aceh Tengah
Untuk Penerima Bantuan

**HASIL KERJASAMA DENGAN
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH
2022**

LAPORAN PENELITIAN

Indikator Kemiskinan
Kabupaten Aceh Tengah
Untuk Penerima Bantuan

HASIL KERJASAMA DENGAN
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH
2022

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**INDIKATOR KEMISKINAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PENERIMA BANTUAN**

TIM PENELITIAN

DR. ANALIANSYAH, MA
DR. AZHARSYAH IBRAHIM, SE.AK., M.S.O.M.
DR. FITHRIADY, Lc., MA
DR. RASYIDAH, MA
IHDI KARIM MAKINARA, S.H.I., S.H., M.H
KHAIRIL AKBAR, S.H.I., M.H

**HASIL KERJASAMA DENGAN
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH
2022**

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	3
A. Rumusan Masalah Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Sistematika Pelaporan.....	4
BAB II KAJIAN LITERATUR.....	5
A. Kajian Teoritis	5
1. Konsep Kemiskinan	5
2. Kemiskinan dalam Islam	15
3. Dimensi/Konstruk Kemiskinan	16
4. Indikator Kemiskinan	22
5. Indikator untuk Mengukur Kemiskinan.....	27
6. Berbagai Indikator Kemiskinan di Indonesia	29
B. Kerangka Berpikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Desain Penelitian	43
1. Jenis dan Data Penelitian	43
2. Tim Peneliti.....	43
3. Jadwal dan Lokasi Penelitian.....	43
B. Pengumpulan Data	43
1. Teknik Pengumpulan Data.....	43
2. Populasi dan Sampel.....	46
3. Responden dan Informan Penelitian	46
4. Instrumen Penelitian	47
C. Analisis Data	48
1. Confirmatory Factor Analysis (CFA).....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2. Pengukuran <i>Goodness of Fit</i> (GoF).....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Aspek Geografis	54
2. Aspek Demografis	55
3. Administrasi Wilayah Kabupaten Aceh Tengah	57
B. Konsep Kemiskinan	58

1. Perspektif Sasaran.....	58
2. Perspektif <i>Stakeholder</i>	60
C. Deskripsi Responden	62
1. Identitas Kepala Keluarga Sasaran	62
2. Kondisi Keluarga	67
3. Kondisi Ekonomi	69
4. Kondisi Perumahan/Tempat Tinggal	72
D. Aksesibilitas Terhadap Jangkauan Program Jaminan Sosial	79
E. Pengujian Konstruk Kemiskinan	80
1. Konstruk Kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah	80
2. Konstruk Kemiskinan Setiap Klaster.....	87
F. Analisis Deskriptif Konstruk Kemiskinan Aceh Tengah....	110
1. Politik.....	111
2. Ekonomi.....	112
3. Budaya	113
4. Psikis.....	114
5. Sosial.....	115
G. Indikator Kemiskinan Untuk Penerima Bantuan Sosial.....	117
1. Metode Penentuan Indikator.....	117
2. Tahapan Penentuan Indikator Kemiskinan.....	118
3. Indikator Miskin Penerima Bantuan	135
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	138
A. Kesimpulan	138
B. Rekomendasi.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam KBBI (2022), kemiskinan diartikan dengan gambaran tentang keadaan seseorang yang tidak memiliki harta, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Kemiskinan menjadi masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, baik itu masyarakat kota, terlebih lagi pada masyarakat desa, dan selalu menarik untuk dikaji. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan, karena hingga kini belum bisa diatasi, bahkan kini semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini juga terjadi di Aceh, sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, dimana kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang sangat besar, bahkan angka kemiskinannya berada pada posisi pertama di wilayah Sumatera, yaitu tidak kurang dari 834,24 ribu jiwa (15,33%) sampai Maret 2021 (BPS, 2021b).

Walaupun begitu, kadang-kadang kemiskinan sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari karena mereka merasakan hidup dalam kemiskinan. Meskipun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani (Isdijoso, Suryahadi, & Akhmadi, 2016). Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin dan mengidentifikasi kemiskinan (Nurwati, 2008).

Variabel yang umum dipakai untuk mengidentifikasi kemiskinan adalah kondisi keterbelakangan, ketidakmampuan dari sisi ekonomi, ketidakberdayaan, dan jumlah pengangguran yang meningkat sehingga menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Namun, apakah variabel-variabel tersebut sudah tepat untuk memahami definisi kemiskinan? Sehingga nantinya program-program yang digulirkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan akan berhasil. Sebab, selama ini ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang belum memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional, bahkan sering berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Sebagai contoh, untuk mengukur kemiskinan, Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif di 6 klaster masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kemiskinan menurut perspektif penerima bantuan adalah kondisi/keadaan yang menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga dimaknai sebagai ketiadaan pekerjaan/ keterbatasan peluang kerja, ketidakpastian penghasilan, keterbatasan keahlian/keterampilan, keterbatasan aset/modal serta keterbatasan dalam mengakses pelayanan penting seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, sanitasi yang sehat seperti air bersih dan lingkungan yang sehat, serta fasilitas kredit untuk pengembangan usaha. Sedangkan konsep kemiskinan menurut stakeholder merujuk pada pengertian kemiskinan yang tidak hanya dilihat dari sisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendefinisikan kemiskinan dari aspek sumber daya manusia, faktor pendidikan, etos kerja yang rendah atau malas, dan faktor alam yang memungkinkan seseorang menjadi miskin.
2. Keluarga yang masuk kategori sangat miskin dan miskin di Aceh Tengah dalam penelitian ini digambarkan dengan kepala keluarga yang mayoritas berpendidikan SD/MI atau paling tinggi berpendidikan SMP atau sederajat, tidak bekerja, kebanyakan lansia dalam kondisi lemah/sakit baik fisik maupun psikis, mempunyai penghasilan tidak menentu tetapi di bawah 500 ribu per bulan. Status tempat tinggal menumpang pada keluarga atau mempunyai rumah sendiri dengan kondisi yang kurang layak, tidak mempunyai aset tetap, kondisi kawin dengan anggota keluarga rata-rata berjumlah 3 hingga 4 orang, bermata pencaharian sebagai buruh tidak tetap non pertanian. Sumber mata air yang digunakan berasal mata air yang tidak terlindungi, tidak memiliki kendaraan pribadi, tidak memiliki sumber penerangan sendiri, serta keadaan sanitasi (MCK) yang tidak layak.
3. Dimensi ekonomi, sosial, psikologis, budaya, dan politik merupakan konstruk yang tepat untuk mengukur kemiskinan di Aceh Tengah. Hasil pengukuran terhadap aspek-aspek dalam dimensi-dimensi tersebut menunjukkan signifikansinya dalam mengukur kemiskinan di daerah ini. Akan tetapi, dalam konteks kajian ini, aspek-aspek dalam dimensi-dimensi tersebut bukan variabel utama yang tepat digunakan untuk menilai kondisi kemiskinan seseorang.

- Sebagian besar merupakan variabel tidak langsung yang berperan sebagai penyebab meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat Aceh Tengah.
4. Hasil olah data, baik berasal dari wawancara, FGD, studi dokumentasi, observasi, maupun dari angket menghasilkan 16 indikator miskin yang dapat digunakan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan di Aceh Tengah. Indikator-indikator tersebut mempunyai bobot yang berbeda untuk setiap klaster penelitian tergantung pada tingkat kepentingannya.
 5. Untuk menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan di Aceh Tengah, kajian ini mengembangkan pola pengklasteran yang didasarkan pada tipologi wilayah dan juga kondisi masyarakatnya. Masing-masing klaster tersebut terbukti mempunyai penilaian berbeda terhadap kriteria kemiskinan. Selanjutnya, kriteria/indikator kemiskinan yang didapat sebelumnya diberikan bobot menurut tingkat kepentingannya dalam masing-masing klaster tersebut. Hasil simulasi di semua klaster penelitian menunjukkan kehandalan dan ketepatan dari kriteria dan bobot tersebut dalam menentukan penerima bantuan di Aceh Tengah.

B. Rekomendasi

Kajian ini menemukan beberapa catatan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Aceh Tengah secara dan di Provinsi Aceh secara umum, yaitu:

1. Lembaga-lembaga pemerintah yang selama menjadi penyalur bantuan bagi masyarakat agar menggunakan yang sama sehingga bantuan diterima masyarakat tepat sasaran dan adil.
2. Jika pemerintah kabupaten maupun provinsi bermaksud melakukan program pengentasan kemiskinan, maka harus dilakukan secara komprehensif mulai dari input, proses, *output*, dan *outcome*. Artinya, program kemiskinan harus direncanakan dengan matang, bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.
3. Melihat fenomena pengentasan kemiskinan di lapangan, kajian ini merekomendasikan agar upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara lintas sektoral dengan pendekatan yang lebih integral dan komprehensif, serta melibatkan berbagai pihak terkait. Demikian halnya dalam merencanakan program pembangunan, khususnya program pengentasan kemiskinan, hendaknya juga mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi kemiskinan, baik dimensi ekonomi, sosial, psikis, politik, maupun budaya.
4. Pengujian konstruk kemiskinan dalam kajian menunjukkan bahwa untuk ketepatan sasaran dalam menentukan penerima bantuan, pola penentuan sasaran harus dilihat secara komprehensif dan sesuai dengan konteks dan masing-masing wilayah.

5. Untuk mengantisipasi kesalahan pengertian dan pemahaman terhadap kriteria kemiskinan yang ditemukan ini, agar para relawan yang akan diturunkan ke lapangan agar dilatih terlebih dahulu dan diberikan pemahaman yang sama dan pengertian yang seharusnya terhadap kriteria-kriteria miskin penerima bantuan. Selain itu, agar setiap skor yang diperoleh oleh para relawan dari lapangan dipanelkan terlebih dahulu sebelum diputuskan apakah seseorang “layak” atau “tidak layak” menerima bantuan.